

DEMOKRASI YANG TERTUNDA: DINAMIKA REGRESI DEMOKRASI DI ASIA TENGGARA PASCA PANDEMI

Angeli Ramadhani

Universitas Sutlan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: angeliramadhani01@gmail.com

Abstract. *Democratic regression has become increasingly evident in Southeast Asia following the COVID-19 pandemic. Emergency policies implemented during the crisis strengthened executive power and weakened the role of oversight institutions in several countries. The Freedom House 2024 report indicates a decline in political and civil freedom scores across most of the region. Digital surveillance and information censorship have expanded rapidly through media regulations and the state's use of surveillance technologies. Electoral democracy continues, but public participation spaces and civil liberties are shrinking. This study employs a literature review method to examine three main dynamics: the strengthening of executive power, control of digital spaces, and the stagnation of democratic reforms. The findings suggest that the pandemic accelerated power consolidation and resulted in a hybrid political system that prioritizes political stability over accountability. The concept of delayed democracy depicts a condition where democracy is still present procedurally, but has not yet recovered in participatory substance. Efforts to restore politics require strengthening the role of civil society and transparency in state administration so that democracy in Southeast Asia can develop once again.*

Keywords: *Democratic Regression, Southeast Asia, COVID-19 pandemic, Civil Liberties, Digital Authoritarianism*

Abstrak. Regresi demokrasi tampak semakin jelas di Asia Tenggara setelah pandemi COVID-19. Kebijakan darurat yang diterapkan selama masa krisis memperkuat kekuasaan eksekutif dan melemahkan peran lembaga pengawas di beberapa negara. Laporan Freedom House 2024 menunjukkan penurunan skor kebebasan politik dan sipil di sebagian besar kawasan. Pengawasan digital dan sensor informasi berkembang pesat melalui regulasi media dan pemanfaatan teknologi pengawasan oleh negara. Demokrasi elektoral tetap berlangsung, tetapi ruang partisipasi publik dan kebebasan sipil menyusut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menelaah tiga dinamika utama yaitu penguatan kekuasaan eksekutif, kontrol ruang digital, serta stagnasi reformasi demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa pandemi mempercepat konsolidasi kekuasaan dan menghasilkan sistem politik hibrida yang memprioritaskan stabilitas politik dibanding akuntabilitas. Konsep demokrasi yang tertunda menggambarkan kondisi bahwa demokrasi tetap hadir secara prosedural, namun belum pulih dalam substansi partisipatif. Upaya pemulihan politik memerlukan penguatan peran masyarakat sipil dan transparansi penyelenggaraan negara agar demokrasi di Asia Tenggara kembali berkembang.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 488

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Regresi Demokrasi, Asia Tenggara, pandemi COVID-19, Kebebasan Sipil, Otoritarianisme Digital	
---	--

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga ujian bagi ketahanan demokrasi di seluruh dunia. Di banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, pandemi menjadi pembenaran bagi penggunaan kekuasaan darurat, pembatasan kebebasan sipil, dan kontrol terhadap arus informasi. *Freedom House* (2024) mencatat bahwa tahun-tahun pandemi menandai kemerosotan paling tajam dalam indeks kebebasan global sejak dua dekade terakhir, dengan sebagian besar negara di Asia Tenggara mengalami penurunan skor kebebasan sipil dan politik.

Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi memang diperlukan untuk menekan laju penyebaran virus. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah di Asia Tenggara memperpanjang status darurat dan menggunakannya untuk menekan oposisi serta memperketat pengawasan terhadap masyarakat. Laporan *The State of Democracy in Asia and the Pacific 2023* yang diterbitkan *International IDEA* (Rune, 2023) menegaskan bahwa beberapa negara di kawasan tersebut mempertahankan langkah-langkah darurat bahkan setelah krisis mereda, sehingga memunculkan pola baru konsolidasi kekuasaan eksekutif.

Fenomena ini dikenal sebagai regresi demokrasi (*democratic backsliding*), yakni kemunduran kualitas demokrasi akibat melemahnya prinsip akuntabilitas, kebebasan sipil, dan supremasi hukum (Kasuya, 2024). Dalam konteks Asia Tenggara, regresi ini tampak dalam bentuk pembungkaman media, penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pemilu, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat sipil. Bunte (2020) menjelaskan bahwa media sosial yang semula menjadi alat demokratisasi justru berubah menjadi instrumen kontrol dan disinformasi oleh negara untuk menjaga stabilitas politik.

Sebelum pandemi, sejumlah negara Asia Tenggara memang menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi, terutama terkait integritas pemilu dan kebebasan berpendapat. Namun, pandemi mempercepat tren tersebut dan memberikan justifikasi politik bagi langkah-langkah otoritarian. Tudor (2020) menggarisbawahi bahwa sejarah politik di kawasan ini telah lama menunjukkan hubungan rapuh antara nasionalisme, otoritarianisme, dan demokrasi. Pandemi kemudian menjadi katalis yang memperjelas ketegangan lama tersebut, dimana kebutuhan akan keamanan nasional dan ketertiban sering kali mengorbankan nilai-nilai kebebasan.

Kasus Myanmar menjadi contoh paling ekstrem. Kudeta militer pada Februari 2021 menunjukkan kegagalan transisi demokrasi di tengah krisis. *Human Rights Watch* (2021) mencatat bahwa pasca kudeta, militer melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di negara dengan pemerintahan militer. Negara-negara yang masih memiliki pemilu rutin seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina juga menunjukkan gejala melemahnya mekanisme kontrol demokratis (Ockey, 2023; Seah, 2023).

Laporan *The State of Southeast Asia 2023* yang diterbitkan *ASEAN Studies Centre* (Seah, 2023) menunjukkan bahwa 62 persen responden di kawasan percaya bahwa demokrasi di negara mereka “berada dalam ancaman” atau “menurun kualitasnya.” Persepsi ini menandakan krisis

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang dianggap gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas selama pandemi. Sementara itu, Reuters (2024) melaporkan bahwa indeks global pemilu bebas dan adil mengalami penurunan terbesar dalam sejarah pada tahun 2023, dengan Asia Tenggara sebagai salah satu penyumbang utama penurunan tersebut.

Dengan demikian, pandemi COVID-19 berperan sebagai titik balik politik bagi demokrasi di Asia Tenggara. Di satu sisi, krisis ini menunjukkan pentingnya koordinasi negara dalam menghadapi ancaman kesehatan global. Namun di sisi lain, krisis tersebut membuka celah bagi pemerintahan yang lemah secara demokratis untuk memperluas kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Fenomena ini menghasilkan bentuk baru pemerintahan yang disebut oleh Pepinsky (2020) sebagai *authoritarian development*, yaitu sistem yang tetap menunjukkan performa pemerintahan yang efisien secara ekonomi, tetapi dengan semakin sedikit ruang bagi partisipasi publik dan kebebasan politik. Artikel ini akan membahas dinamika regresi demokrasi di Asia Tenggara pasca pandemi dengan melihat bagaimana kekuasaan darurat yang lahir di masa krisis telah memengaruhi sistem politik jangka panjang. Analisis ini juga menyoroti bagaimana masyarakat sipil, media, dan pemilu berperan dalam menjaga atau justru memperlemah kualitas demokrasi di kawasan Asia Tenggara

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini sesuai untuk menganalisis fenomena politik yang bersifat kompleks dan berbasis konteks sosial di Asia Tenggara pasca pandemi (Bhandari 2020). Literatur yang ditelaah mencakup artikel akademik, laporan lembaga internasional seperti *Freedom House*, *International IDEA*, dan data indeks demokrasi dari V-Dem dalam lima tahun terakhir.

Analisis dilakukan melalui telaah tematik terhadap temuan empiris mengenai tiga fokus utama yaitu penguatan kekuasaan eksekutif selama dan setelah pandemi, pengendalian ruang digital dan informasi publik, serta mandeknya reformasi demokrasi dan representasi politik. Kajian literatur kualitatif memungkinkan penyusunan sintesis komparatif antarnegara secara sistematis dan relevan untuk ilmu sosial (Baumeister dan Leary 1997). Metode ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola regresi demokrasi di Asia Tenggara berdasarkan bukti yang terdokumentasi dalam sumber kredibel.

Pembahasan

A. Pandemi dan Penguatan Kekuasaan Eksekutif

Pandemi COVID-19 menjadi katalis utama bagi perubahan arah politik di Asia Tenggara. Awalnya, kebijakan darurat diberlakukan untuk mengatasi krisis kesehatan publik. Namun, kebijakan ini kemudian digunakan sebagai sarana memperluas kekuasaan eksekutif dan membatasi kontrol publik. Laporan *Freedom House* (2024) menunjukkan bahwa antara 2020 hingga 2023, tujuh dari sepuluh negara Asia Tenggara mengalami penurunan skor kebebasan politik dan sipil. Penurunan paling tajam terjadi di Myanmar, Kamboja, dan Thailand, sementara Indonesia dan Filipina menunjukkan tren melemah pada aspek kebebasan pers dan independensi lembaga negara.

Menurut Kasuya (2024), krisis pandemi memperlihatkan paradoks demokrasi di Asia Tenggara. Negara-negara yang sebelumnya disebut demokrasi elektoral ternyata

belum memiliki fondasi kelembagaan yang kuat untuk menahan ekspansi kekuasaan eksekutif. Di Thailand, misalnya, penerapan *Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation* sejak Maret 2020 memberi pemerintah kekuasaan luas untuk menahan warga tanpa surat perintah dan membatasi pertemuan publik. Meskipun status darurat dicabut pada 2022, regulasi turunannya tetap berlaku dan digunakan untuk menekan kelompok oposisi.

Di Kamboja, Hun Sen menggunakan pandemi untuk memperluas pengawasan politik. Undang-Undang Keadaan Darurat 2021 memberi kewenangan pemerintah untuk memblokir komunikasi digital, membatasi pergerakan warga, dan menutup media tanpa proses hukum (*International IDEA*, 2024). Akibatnya, menjelang Pemilu 2023, partai oposisi *Candlelight Party* dilarang ikut serta dengan alasan administratif. Data dari Reuters (2024) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih menurun hingga 7 persen dibanding pemilu sebelumnya, sementara CPP meraih 120 dari 125 kursi parlemen, hasil yang menunjukkan tidak adanya kompetisi politik riil.

Kecenderungan serupa juga terjadi di Indonesia dan Filipina, meskipun dalam bentuk yang lebih terselubung. Pemerintah Indonesia mengesahkan berbagai kebijakan ekonomi melalui Perppu Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Minerba dengan justifikasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, proses pembuatannya minim partisipasi publik dan menegasikan peran legislatif. *ISEAS-Yusof Ishak Institute* (2024) menilai kondisi ini sebagai indikasi “*executive aggrandizement*”, yakni penguatan kekuasaan eksekutif dengan melemahkan lembaga kontrol demokratis.

B. Otoritarianisme Digital dan Manipulasi Informasi

Era pasca-pandemi menandai babak baru dalam bentuk otoritarianisme di Asia Tenggara, yaitu melalui penguasaan ruang digital dan informasi publik. Pemerintah di kawasan ini tidak lagi sekadar menggunakan represi fisik, melainkan juga memanfaatkan teknologi untuk membentuk opini dan mengontrol wacana politik. Sinpeng (2022) menyebut fenomena ini sebagai “*digital autocracy*”, di mana pengawasan, propaganda, dan disinformasi dijalankan melalui algoritma dan platform media sosial.

Di Filipina, pemerintahan Marcos Jr. mempertahankan model propaganda digital yang dikembangkan era Duterte. Menurut riset *Oxford Internet Institute* (2023), Filipina masuk dalam lima besar negara dengan aktivitas bot politik tertinggi di dunia. Lebih dari 70 ribu akun teridentifikasi terlibat dalam penyebaran narasi pro-pemerintah dan serangan terhadap jurnalis independen seperti Rappler. *Amnesty International* (2022) mencatat, dalam dua tahun terakhir, setidaknya 40 jurnalis menghadapi intimidasi atau ancaman hukum terkait peliputan korupsi dan pelanggaran HAM.

Di Indonesia, pola kontrol digital dilakukan melalui Undang-Undang ITE dan pengawasan terhadap aktivitas daring. Data dari *Freedom House* (2024) menunjukkan bahwa skor *Internet Freedom Indonesia* turun dari 58 menjadi 51 akibat meningkatnya pemblokiran situs, kriminalisasi ekspresi di media sosial, dan meningkatnya serangan digital terhadap aktivis. Pemerintah juga mengaktifkan patroli siber yang disebut *virtual police*, yang memantau konten media sosial dan memberikan peringatan kepada pengguna. Meskipun diklaim sebagai upaya menjaga ketertiban digital, praktik ini berpotensi menekan kebebasan berekspresi dan memperkuat otoritarianisme berbasis teknologi.

Sementara di Thailand, sensor digital dilakukan dengan menargetkan kelompok pro-demokrasi. Phoborisut (2020) dan Sombatpoonsiri (2021) mencatat bahwa lebih dari 150 aktivis mahasiswa ditangkap karena unggahan di media sosial yang dianggap menghina monarki. Rezim menggunakan Undang-Undang *Computer Crime Act* untuk menekan oposisi, menciptakan efek gentar di kalangan generasi muda yang sebelumnya

menjadi kekuatan utama gerakan reformasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa regresi demokrasi di Asia Tenggara kini tidak lagi bersandar pada kekerasan militer semata, tetapi pada penguasaan atas informasi dan persepsi publik. Negara berhasil membangun citra stabilitas dan kemajuan ekonomi sembari mengikis fondasi kebebasan sipil.

C. Stagnasi Demokrasi dan Tantangan Transisi Politik

Regresi demokrasi di Asia Tenggara tidak hanya ditandai dengan represi negara, tetapi juga stagnasi dalam reformasi kelembagaan dan lemahnya masyarakat sipil. Setelah dua dekade gelombang demokratisasi pascareformasi, sebagian besar negara di kawasan ini kembali ke pola *authoritarian resilience* atau ketahanan otoritarian. Ockey (2023) menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul karena struktur patronase politik yang masih kuat, lemahnya oposisi, dan ketergantungan ekonomi pada elite pemerintah.

Di Myanmar, junta militer mempertahankan kekuasaan melalui represi sistematis. *Human Rights Watch* (2024) melaporkan bahwa sejak kudeta 2021, lebih dari 20.000 tahanan politik ditahan, dan lebih dari 4.000 warga sipil tewas akibat kekerasan militer. Kudeta tersebut menghancurkan harapan atas transisi demokrasi yang sebelumnya dibangun selama satu dekade. Reaksi internasional yang lemah, terutama dari ASEAN, memperburuk situasi. Meskipun organisasi regional tersebut menyerukan *Five-Point Consensus*, hingga 2024 tidak ada kemajuan berarti dalam implementasinya.

Thailand menunjukkan pola stagnasi berbeda, demokrasi tetap hidup secara prosedural, tetapi dibatasi oleh mekanisme hukum dan institusi yang dikendalikan militer. Pemilu 2023 seharusnya menjadi momen kebangkitan, tetapi justru menegaskan dominasi struktur kekuasaan lama. *Brookings Institution* (2023) menggambarkan situasi ini sebagai *democratic façade*, di mana prosedur elektoral digunakan untuk menutupi absennya kekuasaan rakyat.

Sementara itu, di Indonesia, politik dinasti dan pragmatisme elektoral memperkuat kecenderungan stagnasi. Kajian *V-Dem Institute* (2024) mencatat penurunan skor *Liberal Democracy Index Indonesia* dari 0,56 pada 2019 menjadi 0,48 pada 2023. Penurunan ini disebabkan melemahnya kebebasan akademik, polarisasi politik, dan meningkatnya intervensi ekonomi-politik dalam pemilu. Kondisi serupa terlihat di Filipina, di mana kemenangan Marcos Jr. pada 2022 menandai kembalinya kekuatan politik keluarga lama, menunjukkan bahwa oligarki tetap menjadi aktor dominan dalam sistem politik pasca-pandemi.

Regresi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Asia Tenggara kini berada pada fase “tertunda.” Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak sepenuhnya kembali ke otoritarianisme klasik, tetapi terjebak dalam bentuk hibrida yang mana memiliki pemilu, media, dan parlemen, namun tanpa ruang partisipasi dan akuntabilitas sejati. Seperti yang disampaikan Bunte (2023), kawasan ini mengalami *illiberal resilience*, di mana rezim menggunakan bahasa demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan yang semakin eksklusif.

Penutup

Pandemi COVID-19 meninggalkan jejak yang mendalam terhadap arah demokrasi di Asia Tenggara. Di banyak negara, kebijakan darurat yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi kesehatan publik justru membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan eksekutif. *Freedom House* (2024) mencatat bahwa pembatasan sosial dan darurat kesehatan di sejumlah negara kawasan digunakan sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan, membatasi

kebebasan pers, serta mengawasi aktivitas warga di ruang digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pandemi menjadi katalis bagi regresi demokrasi, di mana stabilitas politik ditempatkan di atas kebebasan sipil.

Dalam konteks digital, *International IDEA* (2023) menyoroti bahwa ruang daring kini menjadi medan baru bagi kontrol politik. Pemerintah di beberapa negara memanfaatkan teknologi pengawasan untuk mengawasi perbincangan publik, memblokir situs berita independen, hingga menekan aktivis yang bersuara kritis. Mekanisme sensor dan penyebaran disinformasi yang terorganisir telah menciptakan kondisi di mana demokrasi tampak berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi partisipatifnya. Demokrasi elektoral masih berlangsung melalui pemilu rutin, namun tanpa jaminan akuntabilitas dan kebebasan berpendapat, proses tersebut menjadi simbolik semata.

Brookings Institution (2024) menegaskan bahwa situasi ini melahirkan bentuk pemerintahan hibrida, yakni gabungan antara otoritarianisme dan prosedur demokrasi yang tetap dipertahankan demi legitimasi internasional. Negara-negara seperti Thailand dan Kamboja menunjukkan pola serupa, di mana lembaga demokrasi tetap ada secara formal, tetapi kehilangan daya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, tren serupa muncul dalam bentuk pelemahan lembaga pengawas dan penurunan skor kebebasan sipil, yang menandakan bahwa regresi demokrasi tidak hanya terjadi di negara non-demokratis, melainkan juga di sistem demokrasi yang mapan secara institusional.

Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi di Asia Tenggara sedang mengalami masa penundaan. Demokrasi tidak hilang, tetapi tertahan oleh kepentingan stabilitas dan kekuasaan yang dibungkus dalam retorika pemulihan pasca-pandemi. Jika tidak diimbangi dengan penguatan lembaga pengawas, transparansi digital, serta partisipasi aktif masyarakat sipil, demokrasi di kawasan ini berisiko berubah menjadi ritual elektoral tanpa substansi. Oleh karena itu, masa depan demokrasi Asia Tenggara bergantung pada sejauh mana negara-negara di kawasan mampu menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan kebebasan politik.

“Demokrasi yang tertunda” bukanlah sekadar diagnosis akademik, melainkan peringatan. Demokrasi di kawasan ini belum mati, namun tertidur di antara kompromi dan kontrol. Jalan menuju pemulihan politik memerlukan keberanian untuk menegakkan kembali prinsip kebebasan, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi jantung dari demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunte, M. (2020). Democratic Backsliding and Authoritarian Resilience in Southeast Asia: The Role of Social Media. *Research Gate*, 195-214.
- Bunte, M. (2023). Civil Society and Democratic Decline in Southeast Asia. *Sage Journals*, 297-307.
- House, F. (2024). *Freedom in The World*. Washington : Freedom House.
- Iannone, A. (2022). Democracy Crisis in South-East Asia: Media Control, Censorship, and Disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 81-97.

- International, A. (2022). *Philippines: Submission to The UN Human Rights Committee*. London: Amnesty International.
- Kasuya, Y. (2024). Introduction: Democratic backsliding in Southeast Asia. *Sage Journals*, 3-8.
- Ockey, J. (2023). *Democratic Recession, Authorocratization, and Democratic Backlash in Southeast Asia*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Pepinsky, T. (2020, July 1). *Decoupling governance and democracy: The Challenge of authoritarian development in Southeast Asia*. Retrieved from Brookings: https://www.brookings.edu/articles/decoupling-governance-and-democracy-the-challenge-of-authoritarian-development-in-southeast-asia/?utm_
- Phoborisut, P. (2020). The 2020 Student Uprising in Thailand: A Dynamic Network of Dissent. *PERSPECTIVE*, 1-10.
- Razita, S. (2024). The Decline of Democracy in The South East Asian Region. *Politics and Humanism*, 1-9.
- Reports, C. (2022). Philippines 2022 Human Rights Report. *Human Rights and Labor*, 2-45.
- Reuters. (2024, September 17). *Global index for free and fair elections suffers biggest decline on record in 2023, democracy watchdog says*. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/world/global-index-free-fair-elections-suffers-biggest-decline-record-2023-democracy-2024-09-17/?utm_
- Runey, M. (2023, November 22). *The State of Democracy in Asia and the Pacific 2023*. Retrieved from IDEA: https://www.idea.int/blog/state-democracy-asia-and-pacific-2023?utm_
- Seah, S. (2023). *The State of Southeast Asia 2023*. Singapore: The Asean Studies Centre.
- Sinpeng, A. (2022). Journalism in the Age of Digital Autocracy: A Comparative ASEAN Perspective. *Journal of ASEAN Studies*, 247-262.
- Sombatpoonsiri, D. J. (2021). From Repression to Revolt: Thailand's 2020 Protest and the regional Implications. *GIGA FOKUS*, 2-12.
- Team, V.-D. I. (2024). *Democracy Winning and Losing at the Ballot*. Gothenburg: V-Dem Institute.
- Tudor, M. (2020). Nationalism, Authoritarianism, and Democracy: Historical Lessons from South and Southeast Asia. *Cambridge University Press*, 706-722.
- Watch, H. R. (2021, July 31). *Myanmar: Coup Leads to Crimes Against Humanity*. Retrieved from HRW: https://www.hrw.org/news/2021/07/31/myanmar-coup-leads-crimes-against-humanity?utm_
- Watch, H. R. (2022, January 28). *Myanmar: Year of Brutality in Coup's Wake*. Retrieved from HRW: https://www.hrw.org/news/2022/01/28/myanmar-year-brutality-coups-wake?utm_